Mengimplementasikan Wawasan Nusantara Sosial Dalam Meninjau Bantuan Sosial Di Indonesia Saat Covid 19

Ferika Kurniawati

IIK STRADA Indonesia

ferikakurniawati0063@gmail.com

1. Abstrak

Penyebaran wabah Covid-19 mengakibatkan efek domino bagi semua sektor yang Berawal dari persoalan kesehatan ke persoalan sosial, ekonomi, hingga politik. Menghadapi situasi tersebut pemerintah telah merancang berbagai kebijakan Jaringan Pengaman Sosial dalam upaya melindungi masyarakat rentan serta terdampak dari Pandemi Covid-19. Permasalahan selanjutnya yang senantiasa timbul saat bantuan Sosial digelontorkan oleh pemerintah yakni adanya ketidaktepatan sasaran penerima Bantuan sosial. Oleh karenanya riset ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut Efektivitas penyaluran bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk mengatasi Dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kaidah Kualitatif berdasarkan studi literatur, yaitu kaidah riset yang berorientasi pada Pengumpulan informasi sekunder dari bermacam sumber terkait. Hasil penelitian Diketahui bahwa bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah hingga saat ini masih Belum efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidaktepatan sasaran Penerimaan bantuan, ketidakmerataan penyaluran bantuan, pendistribusian yang lama, Penyelewengan dana, pungutan liar, pengurangan jumlah nominal maupun sumber Daya yang diterima, inclusion dan exclusion error, hingga politisasi bantuan sosial.

2. Pendahuluan

Negara wajib menjamin kesejahteraan setiap penduduknya dan setiap penduduk berhak untuk mendapatkan Kesejahteraan. Kesejahteraan penduduk memberikan pengaruh yang besar pada sistem politik, ekonomi, dan. Sebagainya. Tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu Negara menunjukan seberapa berhasil suatu Negara Dalam mencapai tujuannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah melaksanakan Berbagai program peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun, terkadang program peningkatan kesejahteraan Penduduk tidak

berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan tidak tepatnya sasaran yang disebabkan oleh data Identifikasi target yang kurang akurat. Sering kali ditemukan terjadi kesalahan dalam menentukan kelayakan Penerimaan bantuan. Masalah seperti ketidaktepatan sasaran penerimaan bantuan ini tentunya harus segera diatasi Dan dicari solusinya agar tidak terulang lagi pada program-program bantuan di masa yang akan datang.

3. Kasus/Masalah

- A. Apakah bantuan sosial di Indonesia saat Covid 19 sudah adil dan merata?
- B. Bagaimana bentuk bantuan sosial saat Covid 19?

4. Tinjauan Pustaka

Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) ialah Pemberian santunan berbentuk donasi Atau barang baik dari pemerintah Maupun suatu lembaga kepada Perorangan, keluarga, komunitas, dan Rakyat umum yang sifatnya tidak Selamanya serta selektif dengan tujuan Untuk menyelamatkan dari kemungkinan Terjadinya ancaman sosial (Sitanggang et Al, 2014). Bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah kepada masyarakat Prasejahtera merupakan bantuan Sementara atau tidak bersifat terus Menerus. Bantuan yang diberikan Bertujuan agar masyarakat prasejahtera Tersebut mampu mencukupi Kehidupannya secara seimbang(Kementerian Sosial, 2011). Sejalan Dengan hal tersebut Peraturan Menteri Keuangan (2015) menjelaskan bahwa Bantuan sosial adalah pengeluaran Berupa transfer uang, barang atau jasa Yang diberikan oleh pemerintah kepada Masyarakat miskin atau tidak mampu Untuk melindungi masyarakat dari Kemungkinan terjadinya resiko sosial, Meningkatkan ekonomi dan/atau Kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Rahmansyah et al, (2020) memaparkan Bahwasannya kebijakan bantuan sosial Menjadi salah satu bentuk nyata Tanggung jawab pemerintah baik pusat Maupun daerah terhadap kondisi Rakyatnya yang prasejahtera dan Terabaikan di tingkat terendah.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382).

Penerima dan Pemberi Dana

Penerima BST adalah warga yang dianggap layak menerima bantuan dan terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi covid-19 dan sudah dilengkapi dengan data seperti BNBA (by name by address), NIK dan nomor handphone.

5. Pembahasan

Bantuan Sosial Pemerintah Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah memiliki beberapa Kebijakan untuk melindungi Perekonomian rakyat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan pandemi Covid-19 (Sugiarto, 2020). Tak hanya berfokus pada Pemberian sembako saja, bersama Kementerian Keuangan pemerintah pusat Menciptakan sejumlah skema JPS Atau Social Safety (Adhiyasa, 2020). Bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah pusat telah mengerahkan Berbagai bentuk dan jenis kebijakan bantuan sosial dalam upaya menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini meliputi (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Bantuan Sosial Tunai, (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), (4) Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk Wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), (5) Kartu prakerja, (6) Kartu sembako, dan (7) Subsidi listrik.

Pemberian BLT Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Sosial

1. Dampak Ekonomi

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah Indonesia melakukan upaya penanganan kesehatan, penanganan Dampak sosial dan penyelamatan perekonomian nasional. Penanganan kesehatan Difokuskan pada upaya penyembuhan pasien corona dengan peningkatan anggaran belanja Kesehatan. Agenda penanganan dampak sosial difokuskan pada pelaksanaan jaring Pengaman sosial (social safety net). Sedangkan untuk pemulihan perekonomian diarahkan Kepada pemberian insentif fiskal, perkreditan dan moneter.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) sejak April sudah mulai mencairkan dana bantuan Langsung tunai (BLT) dana desa di seluruh wilayah di Indonesia. Metode pencairannya Akan dilakukan bertahap dimulai dari bulan April ini hingga Juni 2020. Pada setiap Bulannya setiap kepala keluarga miskin akan mendapatkan jatah masing-masing sebesar Rp.600.000. Jumlah keseluruhan masing-masing penerima BLT akan menerima Rp1,8 Juta. Awalnya, pendistribusian ini dengan skenario awal yakni melalui cara nontunai. Namun demikian, karena kondisi yang berbeda di setiap daerah, pendistribusian ada yang Menggunakan cara secara langsung, bahkan melalui pintu ke pintu atau door to door, Untuk mengurangi kerumunan massa. Ini dilakukan sebagai salah satu cara menghindari kerumunan warga serta mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai Penyebaran Covid-19 (Agus Triyono, 2020).

2. Dampak Sosial

Selain dampak terhadap perenomia masyarakat, di satu sisi pemberian BLT dari Segi sosial telah menimbulkan gejala berupa konflik. Penyebabnya karena pelaksanaan Penyaluran di beberapa tempat tidak dilakukan secara baik, adil dan bijaksana, sehingga Munculkan gejala di tengah masyarakat. Secara horizontal akan terjadi kecemburuan Dan disharmoni antar masyarakat yang bisa menimbulkan dampak konflik sosial Berkepanjangan serta bisa juga akan menimbulkan konflik vertikal karena sebagian Masyarakat akan menuduh pemerintahan tidak adil dan tidak benar dalam menyalurkan Bantuan

tersebut .Selain dampak terhadap timbulnya konflik, dampak lainnya adalah pemicu Timbulnya korupsi. Potensi korupsi antara lain saat pemerintah menggelontarkan dana Bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi Covid-19. Penggelapan dana bantuan. Bisa saja anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah Dalam pelaksanaannya, jumlah bantuan tidak sesuai dengan yang diterima. Akibatnya Cukup fatal karena bisa memicu konflik.

6. Penutup

Bantuan sosial sejatinya bermaksud untuk melindungi dan meningkatkan Kesejahteraan hajat hidup masyarakat. Meskipun bantuan sosial tidak menjadi Gagasan utama dalam mengatasi Persoalan sosial dan ekonomi dimasa Pandemi ini, namun hidup beriringan Dengan mendahulukan tindakan saling Peduli, berbagi, tenggang rasa, serta Tolong-menolong menjadi faktor utama Untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi Masyarakat.

7. Daftar Pustaka

- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516-526.
- Dadu, F. D., & Sodik, M. A. (2021). Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.
- Susanto, E. R., Puspaningrum, A. S., & Neneng, N. (2021). Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Tekno Kompak*, 15(1), 1-12.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104.